

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR
TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD) DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Dimas Permana

NPP. 32.0366

Asdaf Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: dimaspermana112131@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina, SE, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The District Inspectorate has an important role in implementing supervision as part of the government's internal control system. The supervision of the Regional Inspectorate greatly influences the audit opinion conducted by the BPK on the Regional Government. Internal supervision still has several weaknesses that make Indramayu Regency get a WTP opinion with a paragraph emphasizing a matter. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the supervision carried out by the Indramayu Inspectorate and to determine the inhibiting factors and efforts made by the inspectorate in carrying out its supervisory function **Method:** The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used are interviews and documentation. **Result:** The results of this study indicate that the supervision carried out by the inspectorate has been running quite well, as evidenced by the conformity of the implementation of supervision according to applicable standards and regulations. The effectiveness of this supervision can be seen from the implementation of systematic audit procedures, comprehensive documentation of findings, and consistent follow-up to the recommendations given. **Conclusion:** The supervision carried out by the Indramayu Inspectorate in maintaining an Unqualified Opinion (WTP) has been going quite well, but there are still obstacles experienced by the Indramayu Regency Inspectorate in carrying out internal supervision. **Keywords:** Opinion, Supervision, Standart*

1956

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Inspektorat Kabupaten memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah. Pengawasan Inspektorat Daerah sangat berpengaruh terhadap opini hasil audit yang dilakukan BPK terhadap Pemerintah Daerah. Pengawasan intern masih memiliki beberapa kelemahan yang membuat Kabupaten Indramayu mendapatkan opini WTP dengan paragraf penekanan suatu hal.

Tujuan: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sudah berjalan dengan cukup baik, yang dibuktikan dengan kesesuaian pelaksanaan pengawasan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Efektivitas pengawasan tersebut terlihat dari implementasi prosedur audit yang sistematis, dokumentasi temuan yang komprehensif, serta tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi yang diberikan. **Kesimpulan:** Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berjalan sudah cukup baik, namun masih terdapat hambatan yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam menjalankan pengawasan internal.

Kata kunci: Opini, Pengawasan, Standar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta menjadi pondasi utama bagi pembangunan daerah berkelanjutan. Sejalan dengan urgensi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel, peran lembaga eksaminatif dalam melakukan pengawasan ketat menjadi semakin krusial. Di Indonesia, lembaga eksaminatif utama yang bertugas mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk di tingkat daerah, adalah Badan Pemeriksa Keuangan. (Amiq, 2016). Pengawasan laporan keuangan memiliki peran vital dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Proses ini menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, yang merupakan amanah dari Masyarakat (Binawati & Badriyah, 2022). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga negara yang bersifat independen, memiliki tugas konstitusional untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam konteks pemerintah daerah, BPK melakukan audit reguler terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Hasil audit ini berupa opini yang mencerminkan tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Inspektorat daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah. Inspektorat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan suatu pengawasan dan pembinaan kepada perangkat daerah. pada penelitian terdahulu Iswanto dan Rufaedah pada tahun 2019, menunjukkan bahwa Inspektorat daerah berperan sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. memastikan bahawa Inspektorat SPIP harus sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal-hal yang perlu diawasi di antaranya adalah standar akuntansi, efektifitas SPIP, kecukupan pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Iswanto & Rufaedah, 2019). Audit internal ini memainkan peran penting dalam mendeteksi segala kesalahan dan kekurangan (Bonrath & Eulerich, 2024). Diperkuat juga dengan penelitian Simanjuntak pada tahun 2024 dengan hasil bahwa audit internal dapat berkontribusi dalam merespons dan mengatasi tekanan keuangan dengan meningkatkan

efektivitas pengendalian internal, kepatuhan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Audit Internal bukan hanya memberikan respons terhadap tekanan keuangan, tetapi juga proaktif dalam pencegahan kecurangan dan pengelolaan risiko keuangan. (Simanjutak, 2024)

Era digitalisasi, pengawasan oleh inspektorat dilakukan secara digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi pengawasan juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, sehingga meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan anggaran publik. (Setiady, 2016)

Tabel 1. 1
Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Indramayu

OPINI BPK	2019	2020	2021	2022	2023
KABUPATEN INDRAMAYU	WTP	WDP	WTP dengan paragraf hal lain	WTP dengan paragraf penekanan suatu hal	WTP dengan paragraf penekanan suatu hal

Sumber : Jabar.BPK.go.id

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa hasil dari pemeriksaan BPK menunjukan bahwa Kabupaten Indramayu selama 5 tahun terakhir menunjukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah indramayu sudah baik karena mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada 4 tahun dari 5 tahun berakhir, walaupun di 3 tahun terakhir ini Kabupaten Indramayu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan beberapa catatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Intern masih memiliki beberapa kelemahan yang membuat Kabupaten Indramayu mendapatkan opini WTP dengan paragraf penekanan suatu hal. Ini merupakan suatu masalah yang harus diatasi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu agar kedepannya dapat meningkatkan dan mempertahankan opini hasil dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Abdullatif dan Kawuq pada tahun 2015 menyatakan bahwa pentingnya auditor sebagai pengawas internal untuk melakukan pengawasan. Inspektorat Indramayu masih tertinggal dalam menerapkan digitalisasi sistem pengawasan yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan di era modern ini (Abdullatif & Kawuq, 2015). Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi digital untuk pengawasan berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan yang masih mengandalkan sistem manual. Smart auditing berpengaruh positif pada hasil pengawasan dan menunjukan bahwa pentingnya pemanfaatan sistem informasi pengawasan di lingkup inspektorat daerah. (Dariesta et al., 2024)

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, pengaruh pengawasan terhadap hasil opini BPK, faktor penghambat pemberian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya penelitian Iswanto dan Rufaedah tahun 2019 yang menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berperan penting dalam meningkatkan opini audit melalui pengawasan dan pembinaan perangkat daerah (Iswanto & Rufaedah, 2019). Serta penelitian oleh Dariesta tahun 2024 dengan hasil penelitian bahwa melalui smart auditing, inspektorat dapat memantau dan memeriksa dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan lebih efektif dan efisien (Dariesta et al., 2024)

Kabupaten Indramayu telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun dengan penekanan paragraph suatu hal. Inspektorat Indramayu juga sebagai pengawas internal di lingkup pemerintah daerah Indramayu masih belum memanfaatkan inovasi dan teknologi melalui aplikasi. Dibandingkan dengan penelitian lain yang telah dilakukan yang menunjukkan manfaat dan peran dari digitalisasi terhadap hasil pengawasan, selain itu penelitian lain yang melihat bagaimana pengaruh pengawasan untuk meningkatkan opini dari BPK, sedangkan Kabupaten Indramayu masih belum melakukan digitalisasi, sehingga diperlukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana pengawasan inspektorat daerah indramayu dalam hal tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mempertimbangkan kondisi spesifik daerah untuk menilai pengawasan inspektorat indramayu dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kesenjangan juga terlihat dari keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas tentang digitalisasi pengawasan. Selain itu belum ada penelitian yang menjadikan Inspektorat Indramayu sebagai objek terkait pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini untuk menggambarkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan baik dalam konteks pengawasan maupun tentang digitalisasi dalam pengawasan. Penelitian oleh Iswanto dan Rufaedah tahun 2019 yang berjudul Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Spip Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) ditemukan bahwa menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berperan penting dalam meningkatkan opini audit melalui pengawasan dan pembinaan perangkat daerah (Iswanto & Rufaedah, 2019).

Penelitian oleh Juanda dan Nauli tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Proses Reviu Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Hasil Reviu Yang Dilakukan Inspektorat Berpengaruh Positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Juanda & Nauli, 2018).

Penelitian Badruddin tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara), ditemukan bahwa Kemandirian dan Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh pada pengungkapan LKPD di Kabupaten Aceh Utara (Badaruddin, 2019).

Penelitian Hendriyani dan Syarief tahun 2020 yang berjudul Evaluasi Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Fungsi Inspektorat (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut), ditemukan bahwa Inspektorat Kabupaten Garut sudah melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun masih ditemukan beberapa kendala (Hendriyani & Syarief, 2020).

Penelitian Dariesta, Rahmat, Buchori, Margaretha dan Darmawan tahun 2024 yang berjudul Manajemen Pengawasan Fungsional dalam Penggunaan Smart Auditing di Inspektorat Daerah Kota Makassar ditemukan bahwa melalui smart auditing, inspektorat dapat memantau dan memeriksa dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pengawasan, sehingga memungkinkan inspektorat untuk melaksanakan tugas pengawasannya dengan lebih baik (Dariesta et al., 2024)

Penelitian Setiady tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-Audit Sebagai Perangkat Pendukung pengawasan Dan pengendalian Pada sektor pemerintahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan teknologi informasi berperan penting mendukung pengawasan di lingkungan pemerintahan (Setiady, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Rahman tahun 2020 dimana penelitian terdahulu tersebut mengkaji tentang peranan pengelolaan asset daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Penegecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). Teori yang digunakan pada penelitian ini juga belum digunakan dalam penelitian terkait pengawasan yaitu teori pengawasan menurut T Hani Handoko tahun 2017 dengan lima dimensi yaitu prosedur, standar, ketelitian, pengukuran pekerjaan dan perbaikan. (Hani, 2017; Rahman, 2020)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penertiban administrasi pindah datang berbasis Aplikasi Si Pandan Ayu Bermartabat, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat, dan mendeskripsikan upaya peningkatan efektivitas serta penanganan hambatan dalam penertiban administrasi pindah datang di Kabupaten Indramayu.

II. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif karena dalam penelitian ini menggunakan data sebagai acuan yang berupa kata-kata serta gambar yang diperoleh dari dokumen dan wawancara. Metode deskriptif mengumpulkan beberapa informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang sehingga penulis dapat menggambarkan situasi jelas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah Kabupaten Indramayu yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.

Penelitian kualitatif menurut Creswell tahun 2017 yaitu suatu metode untuk menggali dan memahami makna yang dalam oleh sebagian individu atau kelompok masyarakat dianggap sebagai penyebab masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Proses penelitian kualitatif didalamnya terlibat strategi serta upaya seperti mengumpulkan data yang spesifik yang diperoleh dari informan lalu data tersebut dianalisis dengan metode induktif yang dimulai dari topik yang umum menuju topik khusus. Metode deskriptif mendeskripsikan secara spesifik tentang karakteristik penelitian sehingga biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dan memutuskan suatu kebijakan. Penjabaran yang detail, jelas, dan spesifik ini menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan teori T Hani Handoko tahun 2017 dengan 5 dimensi yaitu prosedur, standar, ketelitian, pengukuran pekerjaan dan perbaikan.

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder (Simangunsong, 2016:230). Pada konteks penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono tahun 2017 wawancara selalu dilakukan untuk mengumpulkan data awal atau untuk menemukan permasalahan apa saja yang sedang ada dan akan diteliti (Sugiyono, 2017:114) Selanjutnya Dokumentasi Dokumentasi merupakan salah satu acara untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa berbentuk teks, gambar, atau karya dari seseorang (Sugiyono 2017:124).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Di Kabupaten Indramayu

Penelitian ini dianalisis berdasar pada lima dimensi pengawasan menurut teori pengawasan T Hani Handoko (2014), yaitu prosedur, standar, ketelitian, pengukuran pekerjaan dan perbaikan Lima dimensi ini selanjutnya diaailisis berdasarkan indikator sesuai dengan kriteria yang ingin dicapai. Sesuai dengan informasi yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, selanjutnya dipaparkan dibawah ini:

3.1.1. Prosedur

Prosedur pengawasan merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Indramayu sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan regulasi yang berkaitan. Berdasarkan wawancara dengan Inspektur mendapatkan keterangan bahwa prosedur pengawasan inspektorat dilakukan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengawasan. PKPT sendiri mencakup jadwal audit, objek audit, jumlah tenaga auditor, sampai penetapan tim auditnya. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) digunakan sebagai pedoman prosedur dalam melaksanakan pengawasan selama tahun berjalan.

3.1.2. Standar

Standar pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu mencakup beberapa aspek yang penting dalam pengawasan internal pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kode etik dan standar audit yang ditetapkan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu tentu berpedoman pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya, standar ini tentu penting agar kualitas pengawasan baik. Keterangan dari Inspektur Pembantu II mengungkapkan bahwa standar yang digunakan berasal dari peraturan dan regulasi yang telah disusun baik secara nasional maupun standar pada daerah yang tersusun pada dokumen seperti renstra dan renja inspektorat.

Tabel 4.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di semua area perubahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	B
2.	Meningkatnya Pengawasan Kualitas Internal Pembangunan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	2
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Berkinerja Baik	Persen	40

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Indramayu, terlihat bahwa dokumen tersebut memuat standar-standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Standar tersebut tercermin melalui penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang secara langsung berkaitan dengan kualitas pengawasan internal

3.1.3. Ketelitian

Ketelitian dalam pengawasan merupakan aspek penting yang merujuk pada kecermatan, ketepatan, serta kehati-hatian dalam fungsi pengawasan. Ini mencakup kemampuan untuk memperhatikan detail-detail kecil, melakukan verifikasi data secara akurat, dan menjalankan prosedur pemeriksaan dengan benar dan menyeluruh. Peneliti melakukan wawancara dengan inspektur dan memperoleh informasi bahwa aspek ketelitian dalam pengawasan oleh Inspektorat

Indramayu dilakukan dengan baik, namun terkadang adanya perbedaan antara dokumen yang telah diperiksa dan dibina oleh Inspektorat dengan dokumen yang diperiksa oleh eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keterangan juga didapatkan dari Inspektur Pembantu III dan mengungkapkan bahwa aspek ketelitian yang diterapkan di Inspektorat Indramayu cukup ketat karena berdasarkan analisis resiko yang dipetakan sebelumnya. Aspek ketelitian juga mengalami hambatan karena adanya keterbatasan inspektorat yang dihadapkan dengan beban kerja dengan waktu yang singkat dan SDM yang terbatas, maka inspektorat tidak dapat mengecek keseluruhan dokumen dan laporan.

3.1.4. Pengukuran Pekerjaan

Pengukuran pekerjaan menjadi dasar evaluasi kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Indramayu. Adanya indikator pengukuran berdasarkan indikator kinerja memungkinkan Inspektorat untuk menilai efektivitas dan efisiensi pekerjaan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan pengawas dapat dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pengukuran pekerjaan Inspektorat Kabupaten Indramayu masih banyak menggunakan pengawasan secara manual, pemanfaatan digitalisasi di Inspektorat Indramayu menggunakan aplikasi yaitu aplikasi monitoring pengawasan laporan dan tindak lanjut (Ampela Ati) yang baru saja diluncurkan, namun aplikasi ini hanya memantau dokumen dan laporan hasil dari tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, aplikasi ini user nya hanya inspektorat saja. Selain itu penggunaan aplikasi pemantauan ini juga tidak sepenuhnya memenuhi jawaban untuk mengatasi masalah kekurangan SDM, karena tetap perlu adanya pengawasan yang turun ke lapangan untuk mengecek fisik dan kondisi asli, karena aplikasi ini hanya untuk pengecekan dokumen dan laporan. Efektivitas pengukuran pekerjaan ini melalui pemanfaatan teknologi yaitu aplikasi Ampela Ati (Aplikasi monitoring dan pemantauan tindak lanjut) masih tahap pengembangan lebih lanjut agar kedepannya aplikasi bisa lebih maksimal.

3.1.5. Perbaikan

Perbaikan yang dimaksud dalam konteks ini adalah tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan atau penggunaan anggaran oleh perangkat daerah terkait. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran dapat segera diperbaiki. Perbaikan oleh Inspektorat dilakukan setelah pemeriksaan yang selanjutnya penanganan ketika ditemukan ketidaksesuaian yaitu dibuat sebuah draft temuan yang selanjutnya perangkat terkait wajib menindak lanjuti rekomendasi paling lama 60 hari setelah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selanjutnya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu adanya rencana aksi yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.

Hasil rekomendasi dari BPK selanjutnya dikomunikasikan dengan auditee ketika menemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi wawancara dengan penanggung jawab pelaksana kegiatan atau anggaran. Keberhasilan perbaikan ini tidak hanya pada Inspektorat sebagai pengawas internal, namun kepada seluruh perangkat daerah yang terkait agar bertindak kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi tindakan korektif .

3.2. Faktor penghambat pengawasan Inspektorat Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Indramayu

Pengawasan Inspektorat daerah merupakan bagian dari tata Kelola pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Pengawasan Inspektorat Daerah masih menghadapi hambatan yang perlu ditindaklanjuti kedepannya. Faktor penghambat ini didapat berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Inspektorat Kabupaten Indramayu. Berikut beberapa faktor penghambat dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pengawasan dan penunjang pengawasan

Inspektorat Indramayu dalam menjalankan fungsi pengawasan menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pengawasan dan penunjang pengawasan. Keterbatasan ini mencakup aspek kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah auditor dan pengawas seringkali tidak sebanding dengan beban kerja dan luasnya objek pemeriksaan yang harus ditangani, Dari segi kualitas, banyak auditor yang memiliki keterbatasan kompetensi dalam bidang-bidang khusus seperti teknologi Faktor penghambat ini dibuktikan dengan jumlah perbandingan jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan pada Inspektorat Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan dengan Kebutuhan

No	Kelompok Jabatan	Jumlah	
		Bezetting	Kebutuhan
1	Inspektur	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Inspektur Pembantu	5	5
4	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	1	1
5	Jabatan Fungsional Auditor	30	79
6	Jabatan Fungsional P2UPD	17	52
7	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	-	1
8	Jabatan Fungsional Perencana	1	2
9	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	7	7
10	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1
11	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	-	2
12	Jabatan Fungsional Umum	12	21
JUMLAH		76	173

Sumber ; Pengolahan data Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel tersebut, terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu mengalami kekurangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Khususnya untuk posisi Jabatan Fungsional Auditor, tingkat pemenuhan hanya mencapai 37,97% dari total kebutuhan, sementara untuk PUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) lebih rendah lagi, yaitu hanya 32,69%. Secara keseluruhan, Inspektorat Kabupaten Indramayu baru mampu memenuhi 43,93% dari total kebutuhan pegawai yang seharusnya dimiliki, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah pegawai aktual dengan jumlah pegawai ideal yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

- b. APIP sebagai mitra strategis dalam berperan memberikan konsultasi (consulting) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum terlaksana dengan baik

Fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai mitra strategis yang memberikan layanan konsultasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran APIP masih terbatas pada fungsi pengawasan konvensional dan belum berkembang menjadi partner kepada OPD yang dapat memberikan masukan strategis dan solusi konsultatif kepada jajaran pemerintah daerah.

- c. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengawasan belum berjalan maksimal

Pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi dalam lingkup pengawasan di Inspektorat Indramayu masih belum mencapai level optimal. Infrastruktur digital dan sistem informasi yang seharusnya menjadi pendukung utama aktivitas pengawasan belum terintegrasi secara komprehensif dalam proses kerja Inspektorat. Kondisi ini ditandai dengan masih terbatasnya penggunaan aplikasi khusus untuk proses audit, minimnya database terintegrasi untuk pengelolaan temuan dan tindak lanjut, serta belum optimalnya pemanfaatan analisis data berbasis teknologi untuk mengidentifikasi pola penyimpangan. Akibatnya, efisiensi kerja pengawasan menjadi terhambat, sementara potensi teknologi untuk meningkatkan akurasi dan jangkauan pengawasan belum dimanfaatkan sepenuhnya. Penelitian oleh Sari Tahun 2022 juga memperkuat bahwasanya untuk menghadapi tantangan dengan inovasi pemanfaatan teknologi, maka perlu adanya aplikasi pendukung, diperkuat kembali oleh penelitian Suwanda tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa penerapan SAP, kualitas SDM, implementasi sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Nooraini tahun 2022 mendukung pentingnya pemanfaatan aplikasi dalam pengawasan seperti pengawasan dan pengendalian aset adalah dengan mengembangkan SIMDA BMD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan aset yang efektif dan efisien (Suwanda, 2015; Sari, 2022; Nooraini, 2022).

3.3. Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan pengawasan terkait mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indramayu

- a. Mengoptimalkan proses rekrutmen SDM Pengawasan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Inspektorat memiliki peran penting dalam mengatasi hambatan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pengawasan dan penunjang pengawasan melalui berbagai upaya strategis. Salah satu langkah utama adalah menambah jumlah auditor atau personel fungsional yang sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk menyeimbangkan beban kerja dengan jumlah objek pemeriksaan yang semakin luas. Selain itu, inspektorat juga berfokus pada peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan berkelanjutan guna menciptakan tenaga pengawas yang profesional dan kompeten.

- b. Mengoptimalkan kualitas pengawasan yang berorientasi pada pencapaian 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien)

Inspektorat daerah memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan baik, transparan, dan akuntabel. Dalam upayanya mengoptimalkan kualitas pengawasan yang berorientasi pada pencapaian 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien) yang sesuai dengan panduan praktik audit kinerja oleh BPKP. Inspektorat Indramayu juga berfokus pada penguatan sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Komitmen bersama dari pimpinan daerah sangat penting untuk memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam menjalankan fungsinya tanpa intervensi. Selain itu, pemberian sanksi tegas terhadap SKPD yang tidak memenuhi standar pengawasan juga menjadi langkah penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. **Membangun Sistem Informasi Pengawasan Internal yang terintegrasi**

Upaya inspektorat daerah untuk membangun Sistem Informasi Pengawasan Internal yang terintegrasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan di era digital. Inspektorat daerah perlu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan informasi pengawasan secara komprehensif. Hal ini menjadi fondasi penting untuk memastikan sistem yang dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan pengawasan secara menyeluruh.

Aspek keamanan informasi juga tidak boleh diabaikan dengan penyediaan akses berbasis peran yang memastikan keamanan informasi sekaligus memudahkan kolaborasi antar unit kerja. Pengembangan sumber daya manusia inspektorat dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pelatihan menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem. Inspektorat daerah dapat meningkatkan kualitas pengawasan, mempercepat proses audit, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, dan pada akhirnya berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

3.4. Diskusi Temuan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Indramayu tergolong cukup efektif dalam Hal ini tercermin dari tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penekanan paragraph suatu hal yang diperoleh Kabupaten Indramayu. Namun demikian, pengawasan ini masih terdapat beberapa hambatan oleh tiga faktor utama, yakni keterbatasan SDM pengawas, APIP sebagai mitra strategis dalam berperan memberikan konsultasi (consulting) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum terlaksana dengan baik dan Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengawasan belum berjalan maksimal. Temuan ini dibandingkan dengan sejumlah penelitian sebelumnya untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mencakup bagaimana pengaruh pengawasan inspektorat terhadap opini hasil pemeriksaan BPK. yang dimana dari hasil peneliti Iswanto dan Rufaedah tahun 2019 di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memegang peranan strategis untuk mengoptimalkan penilaian audit dengan melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan. (Iswanto & Rufaedah, 2019).

Berbeda dengan temuan dari Juanda dan Nauli tahun 2018 dengan judul Pengaruh Proses Reviu Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian mereka menunjukkan bahwa proses reviu berperan positif terhadap kualitas LKPD, namun penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun dengan proses reviu yang sudah dilakukan dengan baik, masih adanya kemungkinan lain yang membuat hasil pemeriksaan pihak eksternal yaitu BPK masih adanya kekurangan (Juanda & Nauli, 2018)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data serta fakta yang terjadi dilapangan maupun hasil wawancara dengan informan mengenai Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Indramayu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berjalan sudah cukup baik, namun masih terdapat hambatan yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam menjalankan pengawasan internal, dilihat dari 5 dimensi pengawasan yang 3 diantaranya sudah baik dan sesuai yaitu dimensi prosedur, ketelitian dan perbaikan dan 2 dimensi masih adanya hambatan yaitu dimensi standar dan pemantauan
2. Faktor penghambat Inspektorat Indramayu dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang telah penulis simpulkan yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia fungsional pengawasan dan penunjang pengawasan, APIP sebagai mitra strategis dalam berperan memberikan konsultasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum terlaksana dengan baik, serta adanya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengawasan belum berjalan maksimal
3. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu difokuskan pada Mengoptimalkan proses rekrutmen SDM Pengawasan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, mengoptimalkan kualitas pengawasan yang berorientasi pada pencapaian 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien), serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Internal yang terintegrasi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dan keterbatasan dokumen berupa data-data terkait pengawasan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan Inspektorat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di lingkungan instansi tersebut. Dukungan berupa akses data, informasi, serta fasilitas penelitian yang diberikan sangat membantu kelancaran proses penelitian dari awal hingga akhir.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatif, M., & Kawuq, S. (2015). The Role Of Internal Auditing In Risk Management: Evidence From Banks In Jordan. *Journal Of Economic And Administrative Sciences*, 31(1), 30–50. <https://doi.org/10.1108/Jeas-08-2013-0025>
- Amiq, B. (2016). Pengawasan Bpk Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi. 1–23. <http://repository.unitomo.ac.id/96/6/BA%20JURNAL.pdf>
- Badruddin, Agustina, N., & Chyntia, E. (2019). Pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5(2), 29–40. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49. <https://doi.org/10.32477/Jrabi.V2i1.419>
- Bonrath, A., & Eulerich, M. (2024). Internal Auditing's Role In Preventing And Detecting Fraud: An Empirical Analysis. *International Journal Of Auditing*, December 2023, 1–17. <https://doi.org/10.1111/Ijau.12342>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.).
- Dariesta, T. J., Rahmat, D., & ... (2024). Manajemen Pengawasan Fungsional Dalam Penggunaan Smart Auditing Di Inspektorat Daerah Kota Makassar. *Madani: Jurnal*, 2(12), 633–644. <https://jurnal.penerbitdaarhuda.my.id/index.php/majim/article/view/2357%0ahttps://jurnal.penerbitdaarhuda.my.id/index.php/majim/article/viewfile/2357/2386>
- Hendriyani, I., & Syarif, A. (2020). The Evaluation Of Supervision Effectiveness In The Implementation Of The Inspectorate Functions (Case Study At Regional Inspectorate Of Garut Regency). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 75–85. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/2363>
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019). Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Spip Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1146–1159. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1477>
- Juanda, A., & Nauli, P. (2018). Pengaruh Proses Reviu Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(1), 41–54. <https://doi.org/10.23960/Jak.V23i1.89>
- Rahman, H., Heriyanto, M., & Sukirno Putro, T. (2020). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 124–130. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/Tra/article/view/327>
- Sari, D. A., Margules, C., Lim, H. S., Sayer, J. A., Boedhihartono, A. K., Macgregor, C. J., Dale, A. P., & Poon, E. (2022). Performance Auditing To Assess The Implementation Of The Sustainable Development Goals (Sdgs) In Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/Su141912772>
- Setiady, R. (2016). Pengembangan Aplikasi E-Audit. *Tedc*, 10(1), 52–60.
- Simanjuntak, T. H. (2024). Audit Internal Terhadap Kecurangan Dan Penyimpangan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 8(1), 949. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V8i1.1823>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality Of Local Government Financial Statements To Get Unqualified Opinion (Wtp) Of Audit Board Of The Republic Of Indonesia (Bpk). *Research Journal Of Finance And Accounting*, 6(4), 139–157. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/19978/20506>

